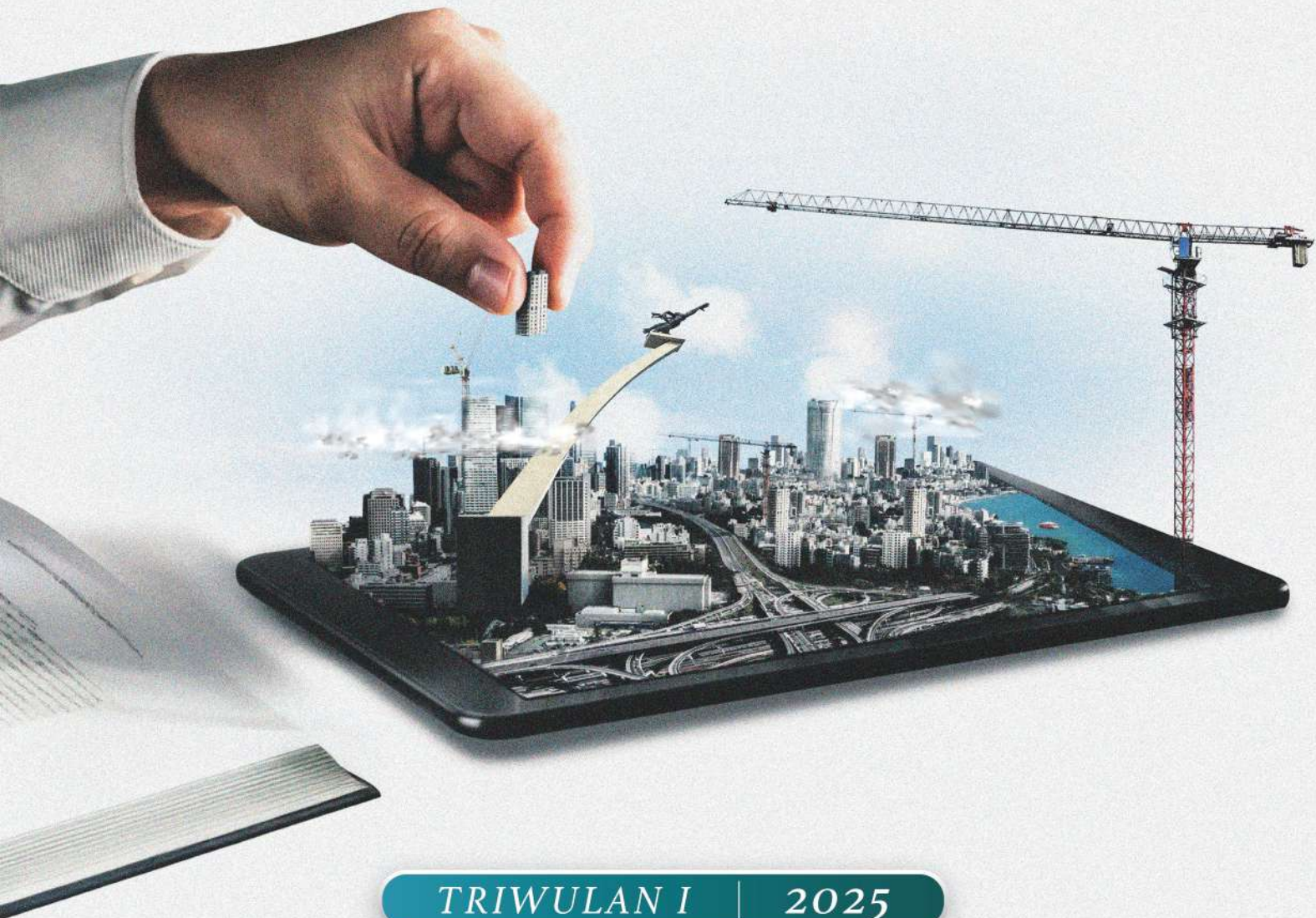




LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN I | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Papua Barat Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Masnah, S.Pd.I	PIC Kegiatan SAKIP	11 - 4 - 2024	
2.	Diperiksa	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T	Kepala Subbagian Tata Usaha	11 - 4 - 2024	
3.	Disetujui	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T	Kepala Subbagian Tata Usaha	11 - 4 - 2024	
4.	Disetujui	Andreas, S.E, M.E.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	11 - 4 - 2024	
5.	Disetujui	Herwanto, A.Md.LLAJ., S.IP., M.M.	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	11 - 4 - 2024	
6.	Disetujui	Syaifullah, ST.	Plt. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	11 - 4 - 2024	



• KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Inayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan sarana pemantauan capaian kinerja dan anggaran berdasarkan dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan Timeline SAKIP Tahun 2025 Laporan Monitoring Capaian Kinerja terdiri dari 4 laporan yaitu Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV. Dimana setiap laporan akan menjelaskan capaian kinerja dan anggaran setiap periode triwulan berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Sorong, 11 April 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat,



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002



• RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dalam rangka mendukung visi Presiden RI pada Tahun 2025 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Indikator dan 9 (sembilan) indikator Kinerja Program dengan targetnya.

Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang kurang dari 100% ($0\% \leq IK < 100\%$) dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang lebih besar atau sama dengan 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian untuk setiap IKK pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 32,07% (target 100%) tercapai 32,07%;
2. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 125,43% (target 100) tercapai 25,43%;
3. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 8 lokasi (target 8 lokasi) tercapai 100%;
4. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi sebesar 0% (target 100) tercapai 0%;
5. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 100% (target 100) tercapai 100%;
6. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0 orang (target 500) tercapai 0%;
7. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 0% (target 100) tercapai 0%;
8. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 11,11 (target 90) tercapai 12,34%;
9. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 22,22 (target 90) tercapai 24,68%.

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran program dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR LAMPIRAN	VIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
I. 1 Latar Belakang	1
I. 2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.2.1 Struktur Organisasi	2
I. 3 Sumber Daya Manusia	5
I. 4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	5
I.4.1 Sumber Daya Manusia	5
I. 5 Sistematika Laporan	9
I. 6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	12
I.6.1 Uraian Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025	15
I. 7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
BAB II.....	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja	19
II.2. Pengukuran Capaian Kinerja	20
II. 3. 1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda.....	22
II. 3. 2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	32
II. 3. 3 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya keselamatan transportasi darat	37
II. 3. 4 Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	46
II. 3. 5 Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat.....	52
II.3. Alokasi Anggaran Tahun 2025	52
III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025	52
II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	60
II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	64
BAB III.....	66
PENUTUP	66
III.1 Penutup.....	66
III.1.1 Ringkasan Capaian.....	66

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	67
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Untuk menunjang penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya. Hal ini merupakan salah satu kriteria untuk instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi kepada masyarakat dan rakyat. Selain itu, akuntabilitas publik juga diperlukan sebagai tolak ukur fluktuasi dan perbandingan kinerja suatu instansi disetiap tahunnya.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Monitoring Capaian Kinerja disusun berdasarkan realisasi kegiatan dan anggaran dari indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja berdasarkan siklus anggaran yang berjalan per tiga bulan. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Dalam pembuatan Laporan Monitoring Capaian Kinerja suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat yang didapat dari penyusunan suatu Laporan Monitoring Capaian Kinerja yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 3 (tiga) bulan anggaran juga menjadi dasar untuk membuat LKIP pada akhir Tahun.

I. 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Tugas Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- 2) Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah :
 - a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b) pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
 - c) pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
 - d) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
 - e) pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;

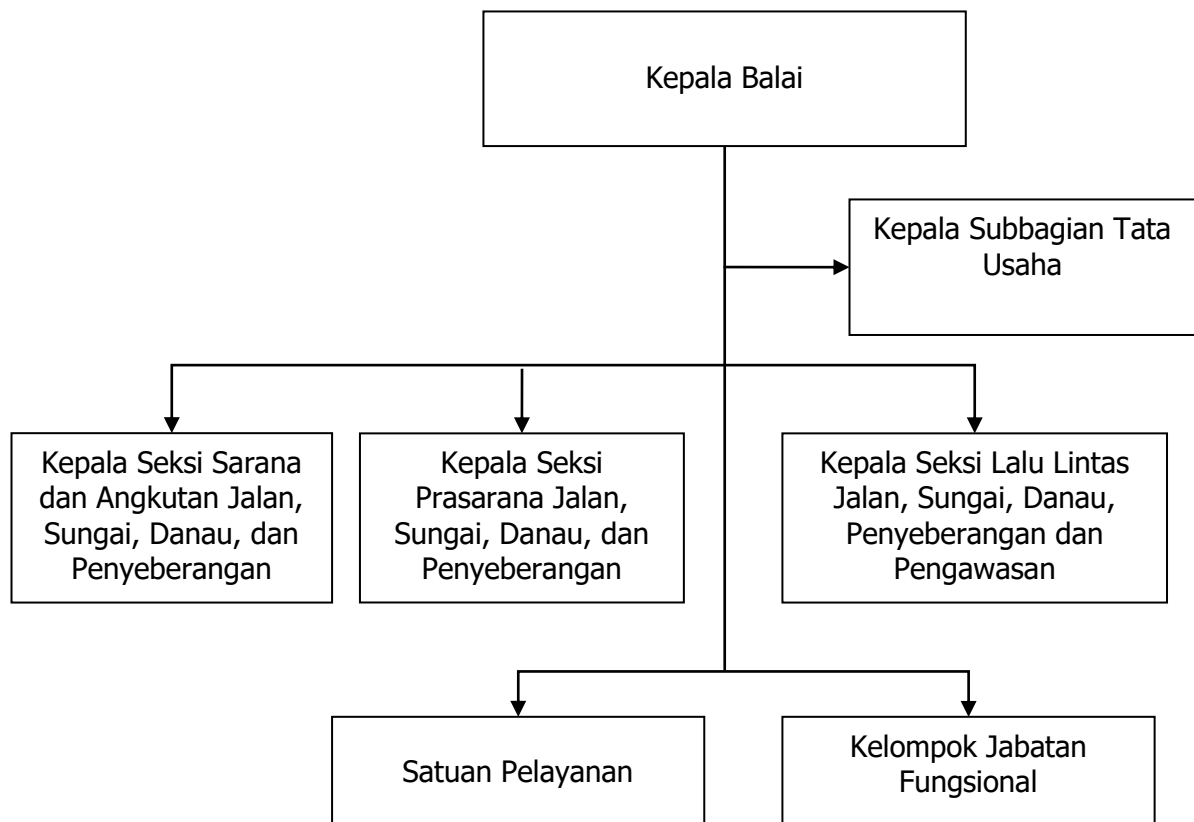
I.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan BPTD kelas II.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
4. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II PAPUA BARAT**



Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipandan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.
4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I. 3 Sumber Daya Manusia

Data sumber daya manusia pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Tahun 2025 terdapat 154 orang dengan rincian 74 Orang ASN dan 80 Orang PPNPN dengan rincian penempatan sebagai berikut:

Tabel I. 1 Daftar pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

No	Nama Bagian	Jumlah Pegawai
1	Kepala Balai	1 orang
2	Subbagian Tata Usaha	36 Orang
3	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	13 orang
4	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	23 orang
5	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	20 orang
6	Satuan pelayanan (SATPEL)	
	1) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Klademak	20 orang
	2) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Arar	13 orang
	3) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Marampa	7 orang
	4) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Folley	3 orang
	5) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Wasior	2 orang
	6) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Waigeo	6 orang
	7) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Salawati	4 orang
	8) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Batanta	6 orang
Total		154 orang

I. 4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana jalan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih

terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah;
- 6) Pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
- 7) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan
- 8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian perhubungan.

I.4.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi. Kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai di lingkungan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat masih sangat banyak, mengingat wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan Balai dengan 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat dan juga banyak terdapat Satuan Pelayanan.

I.4.1. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat karena terdapat beberapa kegiatan yang mengalami pemotongan anggaran.

I.4.2. Isu Strategis

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah :

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

I.4.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja

3. Indikator Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I. 5 SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.3.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
 - 1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
 - 2. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.2 SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

1. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.3. SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

2. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

3. IKK7.a Persentase Stadarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.4. SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.5 SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

1. IKK 1.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

- 1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- 2. Refocusing Anggaran Tahun 2025

- a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025
 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2024-2025
- II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025
1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025
 2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
 3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
 4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
- II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan
 2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (Tabel Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah Eksisting SDM)
 3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025.

I. 6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025-2029 saat ini masih dalam proses perumusan sehingga pada laporan ini masih menggunakan Rencana Strategis periode 2020-2024 dan akan dilakukan perbaikan jika sudah ada RENSTRA terbaru.

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari

peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Target capaian kinerja maupun rencana inventarisasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020-2024 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan yang handal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun kedepan.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I. 2 Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Periode Renstra 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2019	Target S.D 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	-	-
		IKK1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	100
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan	Lokasi	5	8

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2019	Target S.D 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		SDP yang beroperasi			
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	-	-
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-	-
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	-	-
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	-	2
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukasi	Lokasi	-	-
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-	500
		IKK7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100
		IKK4.7 Jumlah ketersediaan fasilitas	Lokasi	-	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2019	Target S.D 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		keselamatan alur pelayaran SDP			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90
5.	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	90

I.6.1 Uraian Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan turunan dari Rencana Strategis. Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan target per tahun berjalan. Pada Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat memiliki Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut:

Tabel I. 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

I. 7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai turunan dari program kerja Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pada Tahun anggaran 2025 Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat berdasarkan Renstra terdapat 5 Sasaran Kegiatan dan 9 Indikator Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.243.346.000,-. Adapun uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel I. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
4.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat Rp. 60.113.993.000

KEGIATAN		ANGGARAN
2.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 17.352.602.000
3.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 3.914.645.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 10.862.106.000



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal. Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target PK}} \right) \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025. Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

II.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target perjanjian kinerja dengan capaian Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat maka diperoleh data Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Triwulan I adalah sebesar 32,72%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	Triwulan I		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	32,07	32,07%
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	25,43	25,43%
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	7	7	7	100%
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	0	0%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					
IKP 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100%
IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	orang	500	500	0	0%
IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100	0	0%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	11,11	12,34%
SK6	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat					
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	22,22	24,68%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						32,72 %
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						2
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)						7

Jika dilihat lebih detail pada Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja dari 9 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat, terdapat 1 (satu) IKK yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 8 (delapan) IKK kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Penjelasan capaian IKK untuk setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

II. 3. 1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

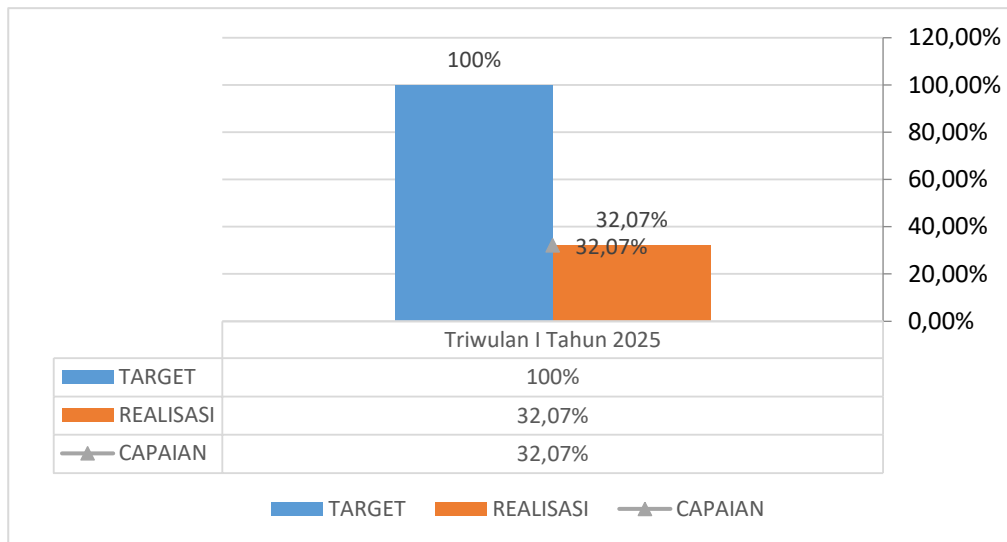
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan. Dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat melaksanakan subsidi ke 3 cabang terminal Damri yang berada di Provinsi Papua Barat. Adapun 3 cabang damri tersebut adalah:

Tabel II. 2 Perum Damri di Provinsi Papua dan Papua Barat

No	Nama Perum	Jumlah Trayek
1	Damri Cabang Sorong	7 Trayek
2	Damri Cabang Sorong Selatan	10 Trayek
3	Damri Cabang Manokwari	6 Trayek
Total Trayek		23 Trayek

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja subsidi operasional keperintisan angkutan jalan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 16,28% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 16,28% Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 1 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Narasi Dasar Hukum

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 5958 Tahun 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025. Dalam Surat Keputusan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) jaringan trayek dari 3 cabang Damri dibawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan.
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum.
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilih transportasi yang murah.

Potensi Kegagalan

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 memiliki capaian kinerja 16,28%. Terdapat potensi kegagalan yang dapat disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut :

1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal;
2. Trayek tidak dapat beroperasi karena ruas jalan pada trayek tersebut rusak.
3. Usia kendaraan yang sudah tua dan adanya kelangkaan BBM.

Perhitungan Realisasi Kinerja

Capaian persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan adalah sebagai berikut :

No	Cabang Damri	Trayek		Ritase	Ritase	
				Target	Realisasi s.d. Maret 2025	Sisa
1	2	3		4	5	
PROVINSI PAPUA BARAT						
1	SORONG	1)	Sorong - Seget	143	18,5	124,5
		2)	Sorong - Klasari	143	44,5	98,5
		3)	Sorong - Arar	143	48	95
		4)	Sorong - Batu Payung - Klawak	143	48,5	94,5
		5)	Sorong - Saoka	143	44	99
		6)	Inam - Kebar - Mia	143	41	102
		7)	Sorong-Klafdalín	143	41	103
Jumlah				1001	285,5	716,5
2	SORONG SELATAN	1)	Teminabuan - Seremuk	143	46,5	96,5
		2)	Teminabuan - Moswaren	143	48	95
		3)	Teminabuan - Wayer	143	47	96
		4)	Teminabuan - Sasnek	143	48	95
		5)	Teminabuan - Aitinyo	143	49	94
		6)	Teminabuan - Ayamaru	143	49	94
		7)	Kajase - Konda	143	42	101
		8)	Kajase - Pasir Putih	143	49	94
		9)	Kajase - Haemaran - Joksiro	143	49	94

No	Cabang Damri	Trayek		Ritase	Ritase	
				Target	Realisasi s.d. Maret 2025	Sisa
1	2	3		4	5	
		10)	Kajase - Waihali	143	47,5	95,5
Jumlah				1430	475	955
3	MANOKWARI	1)	Manokwari - Arfu	143	49	94
		2)	Manokwari - Saray	143	28	115
		3)	Manokwari - Sidey	77	49	28
		4)	Manokwari - Masni	143	49	94
		5)	Manokwari - Momiwaren	143	49	94
		6)	Momiwaren - Ransiki	143	49	94
Jumlah				792	273	519
Total Provinsi Papua Barat				3223	1033,5	2189,5

$$Realisasi Kinerja IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$Realisasi Kinerja IKK1.1 = \frac{1033,5}{3223} \times 100\% = 32,07\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja, berdasarkan realisasi ritase sampai dengan triwulan I jika dibandingkan dengan target ritase dalam 1 (satu) tahun dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan yakni 16,28%.

Perhitungan Capaian Kinerja

$$Capaian Kinerja = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$Capaian Kinerja = \frac{32,07}{100} \times 100\% = 32,07 \%$$

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja IKK1.1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dimana target yaitu 100% kemudian realisasi sebesar 32,07% sesuai dengan rumus yang digunakan yaitu realisa dibagi target maka capaian yang di peroleh yaitu 32,07%. Capaian Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tidak mencapai target karena beberapa trayek tidak memenuhi target ritase dan kemungkinan akan dilakukan addendum terkait target ritase.

Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 3.786.268.590,- dan realisasi anggaran hingga akhir Triwulan I sebesar Rp. 837.383.545. atau sebesar 22,12% dari nilai kontrak.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
1. Mengadakan pemeriksaan rutin armada minimal 3 (tiga) bulan sekali, agar apabila terjadi kerusakan pada armada dapat segera ditangani dan bisa melakukan pelayanan secara maksimal.
 2. Menghimbau kepada Perum Damri yang memiliki armada Bus yang mengalami kerusakan agar melakukan perbaikan dan pemeriksaan secara rutin.
 3. Melakukan persiapan addendum terkait target ritase.

2. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

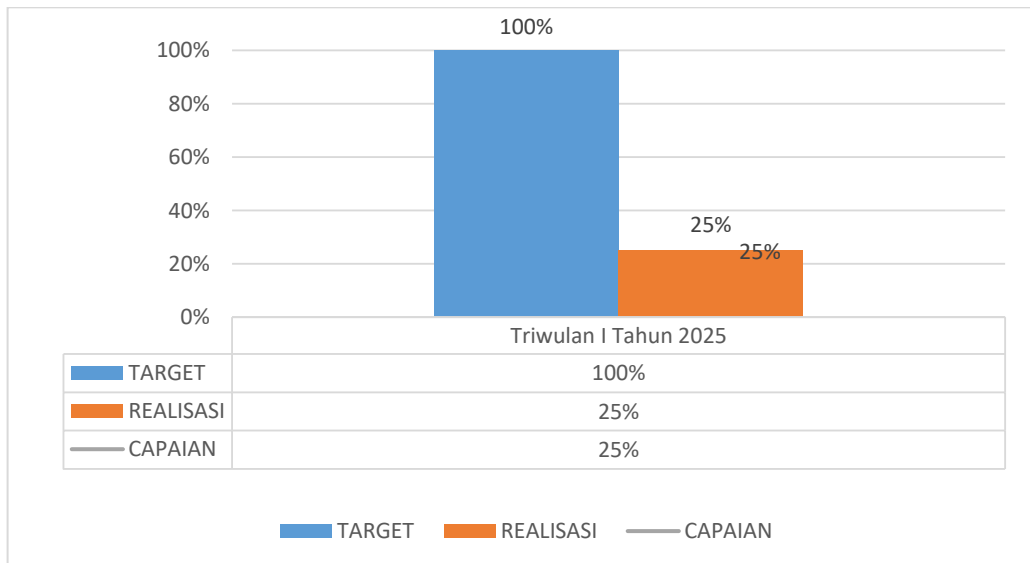
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung dari jumlah pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan yang terdapat di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat. Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan jumlah pelayanan keperintisan yang terlayani. Dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat melaksanakan subsidi ke 6 pelayanan keperintisan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 25,43 % dimana dari 6 pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan, semuanya beroperasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2025 sebesar

100 % maka capaian kinerja mencapai 25,43 % Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini :



Gambar II. 2 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Dasar Hukum

Sesuai surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 5958 Tahun 2024 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025. Dalam Surat Keputusan tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) nama lintas di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat yang terbagi dalam 6 KMP dan 2 Cabang PT ASDP.

Kronologi Target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor Keberhasilan

Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat
2. Jalur yang dilayani untuk masyarakat yang terisolir
3. Kepastian jam operasioanal Keperintisan Angkutan Penyeberangan

4. Satu-satunya pilihan moda transportasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang beroperasi melayani masyarakat

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan tidak memenuhi Dimana target kegiatan adalah 100 % namun hanya terealisasi sebesar 25,43% sehingga capaian kinerja yaitu 25,43%. Adapun penyebab kegagalan dalam memenuhi realisasi kinerja dan capaian kinerja yakni :

1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal;
2. Dokumen terkait tagihan mengalami banyak perubahan sehingga harus dilakukan beberapa prosedur sebelum pencairan seperti addendum dan lain-lain;
3. Adanya kerusakan kapal sehingga mengganggu pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan;
4. Dilakukannya Docking kapal yang tidak sesuai dengan waktunya.

Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja yakni sebagai berikut :

$$Realisasi = \left(\frac{Realisasi Trip}{Target Trip} \right) \times 100 \%$$

$$Realisasi Kinerja = \frac{488}{1919} \times 100\% = 25,43\%$$

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024 terdapat 30 kabupaten pada wilayah kerja BPTD Kelas II Papua dan BPTD Kelas II Papua Barat yang termasuk dalam daerah tertinggal, namun hanya 12 kabupaten yang memiliki wilayah perairan dengan 6 diantaranya sudah terlayani keperintisan angkutan penyeberangan.

Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja yakni sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target PK}} \right) \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{25,43}{100} \times 100 \% = 25,43 \%$$

Dari 6 lintasan perintis angkutan penyeberangan, seluruh lintasan dilayani sehingga capaian persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan adalah 100%.

Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait persentase pelaksanaan keperintisan penyeberangan yaitu senilai Rp. 12.346.883.000,- dengan realisasi anggaran hingga akhir Triwulan I sebesar Rp. 1.236.500.104,- atau sebesar 10,01 % dari total anggaran.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Mengadakan pemeriksaan rutin KMP minimal 3 (tiga) bulan sekali, agar bila terjadi kerusakan pada KMP dapat segera ditangani dan bisa melakukan pelayanan secara maksimal;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keperintisan penyeberangan;
3. Diperlukan pembangunan pelabuhan penyeberangan sehingga lintasan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dapat bertambah.

3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

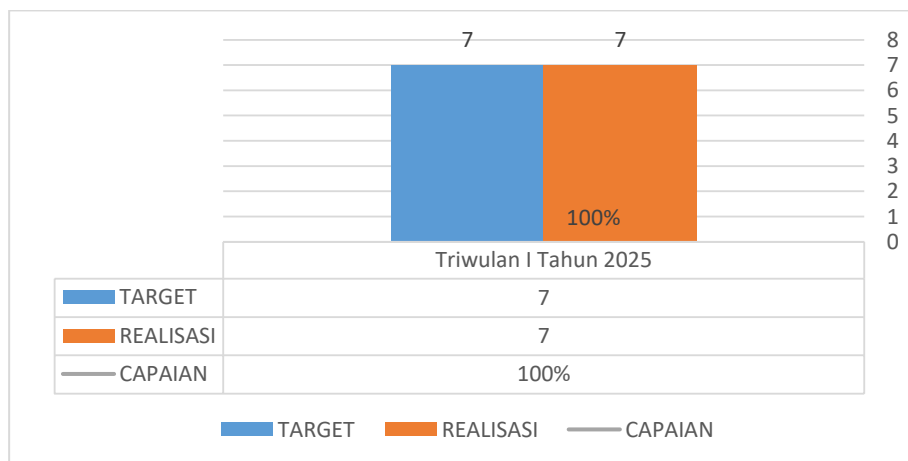
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dihitung dari jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terhadap jumlah pelabuhan SDP yang telah dibangun oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat. Namun pada

matrik RENSTRA output dari Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dihitung jumlah pelabuhan SDP yang sudah beroperasi.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 sebanyak 7 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebanyak 7 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100 % pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 4 Grafik capaian IKK Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar II. 3 Grafik capaian IKK Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau, Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda transportasi.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 7 lokasi pelabuhan yang sedang beroperasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong;
2. Pelabuhan Penyeberangan Arar Kab. Sorong;
3. Pelabuhan Penyeberangan Marampa Manokwari;

4. Pelabuhan penyeberangan Folley Kab. Raja Ampat;
5. Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat;
6. Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat;
7. Pelabuhan Penyeberangan Waigeo Kab. Raja Ampat.

Kronologi target

Jumlah pelabuhan yang beroperasi sebanyak 7 lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat renstra 2020-2024.

Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya
2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja

Potensi Kegagalan

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi mengalami keberhasilan, dimana target kegiatan adalah 100 %. Meskipun capaian kinerja memenuhi target 100%, namun terdapat potensi kegagalan dalam memenuhi realisasi kinerja dan capaian kinerja yakni :

1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal;
2. Kondisi fasilitas pelabuhan yang masih kurang memadai;
3. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi dalam penandatanganan dokumen berlayar.

Perhitungan Realisasi Kinerja

Keberhasilan capaian indikator kinerja dan realisasi kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja IKK1.6

= Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan

dioperasikan s.d tahun (n)

Realisasi Kinerja IKK1.6 = 7

Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, jumlah pelabuhan SDP yang sudah beroperasi pada tahun ini sebanyak 7 pelabuhan.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi}}{\text{target Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 7/7 \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja dapat diketahui bahwa capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 100%.

Pagu, realisasi, dan capaian keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 yaitu Pagu sesuai Revisi 4 senilai Rp. 2.516.175.000 realisasi anggaran hingga akhir Maret 2025 sebesar Rp. 603.168.000 atau sebesar 23,97 % dari total anggaran.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di masa yang akan datang Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan para coordinator satuan pelayanan pelabuhan penyeberangan yang beroperasi agar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana;
2. Memenuhi kebutuhan setiap satuan pelayanan seperti kebutuhan alat tulis, SDM dan perlengkapan lainnya;
3. Melakukan revisi anggaran jika terdapat satuan pelayanan yang memerlukan anggaran yang lebih banyak;
4. Meningkatkan kualitas SDM di pelabuhan penyeberangan seperti mengikuti Diklat yang terkait dengan pelabuhan penyeberangan.

II. 3. 2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

1. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

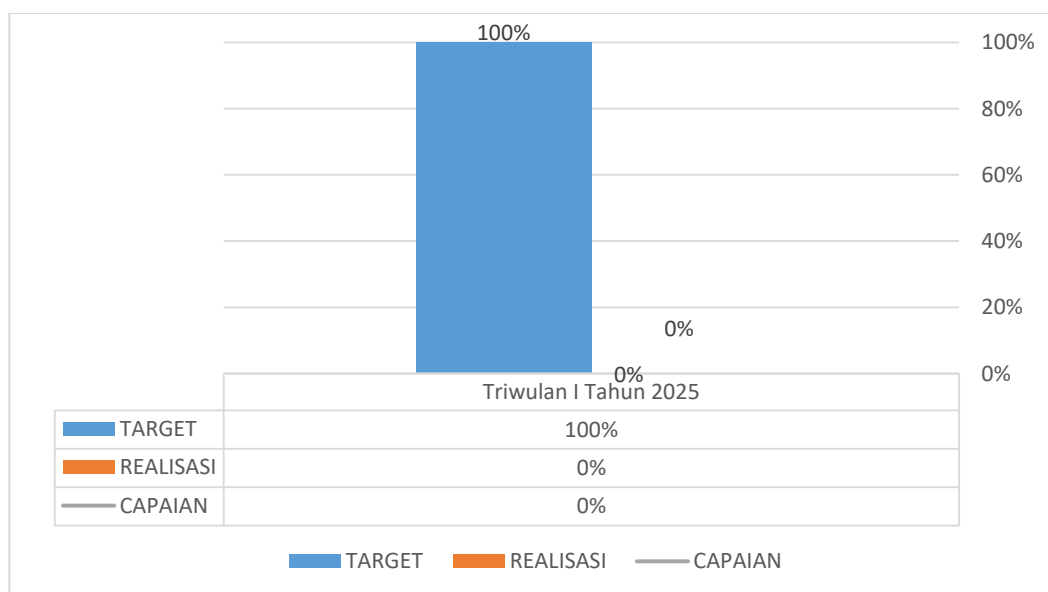
Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung dari jumlah pelabuhan SDP yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Saat ini Balai

Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat telah mempunyai 8 (delapan) satuan pelayanan pelabuhan penyeberangan, yakni :

- a. Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan Marampa
- b. Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan Folley
- c. Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan Wasior
- d. Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan Arar
- e. Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan Klademak
- f. Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan Salawati
- g. Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan Batanta
- h. Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan Waigeo

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebanyak 0 % jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 100 % maka capaian kinerja mencapai 0 % pencapaian ini digambarkan pada Gambar II. 6 Grafik capaian IKK Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.



Gambar II. 4 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Narasi Dasar Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) diPelabuhan SDP berdasarkan PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

- Kronologi Target

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada angkutan penyeberangan di pelabuhan SDP merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan	Uraian
SPM Pelayanan Penumpang	Aspek Keselamatan
SPM Pemuatan Kendaraan	Aspek Keamanan
	Aspek Kenyamanan
SPM Pengoperasian Kapan	Aspek Kemudahan/Keterjangkauan
	Aspek Kesenjangan
	Aspek Keteraturan

Output yang di harapkan pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP yaitu persentase pelabuhan SDP yang melaksanakan Standar pelayanan Minimum (SPM). Di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terdapat 8 Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP yang beroperasi yaitu :

- Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Arar, yang meliputi wilayah kerja di pelabuhan penyeberangan Arar.
- Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Folley, yang meliputi wilayah kerja di pelabuhan penyeberangan Folley.
- Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Waigeo, yang meliputi wilayah kerja di pelabuhan penyeberangan Waigeo.
- Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Marampa, yang meliputi wilayah kerja pelabuhan penyeberangan Marampa.
- Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Klademak, yang meliputi wilayah kerja pelabuhan penyeberangan Klademak.
- Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Salawati, yang meliputi wilayah kerja pelabuhan penyeberangan Salawati di Kab. Raja Ampat.
- Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Batanta, yang meliputi wilayah kerja pelabuhan penyeberangan Batanta di Kab. Raja Ampat.

- Faktor Keberhasilan

Keberhasilan tercapainya indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dan pemerintah daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dengan adanya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal keberangkatan di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;
4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dalam mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui Kegiatan :
 - a. Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Pengoperasian KapalAngkutan Penyeberangan;
 - b. Pemeriksaan Kapal Angkutan Penyeberangan Setelah Docking Termasuk Kapal Perintis.

- Potensi Kegagalan

1. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) diPelabuhan SDP mengalami kendala bilamana cuaca ekstrim seperti gelombang tinggidan musim penghujan, sehingga dapat menghambat kegiatan tersebut.
2. Kurangnya pemahaman pengguna jasa tentang keselamatan dan ketertiban selamamelakukan perjalanan dalam menggunakan angkutan penyeberangan.
3. Masih adanya kendaraan ODOL (*Over Dimensi Over Load*) yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberangan, sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Saat ini pelaksanaan standar Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 belum dilaksanakan. Rencana pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pada bulan Agustus 2025 karena masih menunggu hasil efisiensi anggaran.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang Memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang Dipantau}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi kinerja} = \frac{0}{7} \times 100 = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 0%.

- Perhitungan Capaian Kinerja

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Pelabuhan yang Memenuhi SPM}}{\text{Target Jumlah Pelabuhan yang Dipantau}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{7} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP yakni 0%.

- Realisasi keuangan

Adapun anggaran terkait Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 yaitu Pagu sesuai Revisi 4 senilai Rp. 2.516.175.000 realisasi anggaran hingga akhir Maret 2025 sebesar Rp. 603.168.000 atau sebesar 23,97 % dari total anggaran.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan pencapaian kinerja lebih optimal.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
3. Pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan di pelabuhan yang optimal.

II. 3. 3 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya keselamatan transportasi darat

1. IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KU.001/1/12/DJPD/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan kontraktual tidak dapat terlaksana. Pada Tahun 2025 BPTD Kelas II Papua barat hanya melaksanakan satu kegiatan pengadaan dan pemasangan Perlengkapan jalan yaitu pengadaan dan pemasangan paku jalan Bulat (Tempered). Sedangkan kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran.

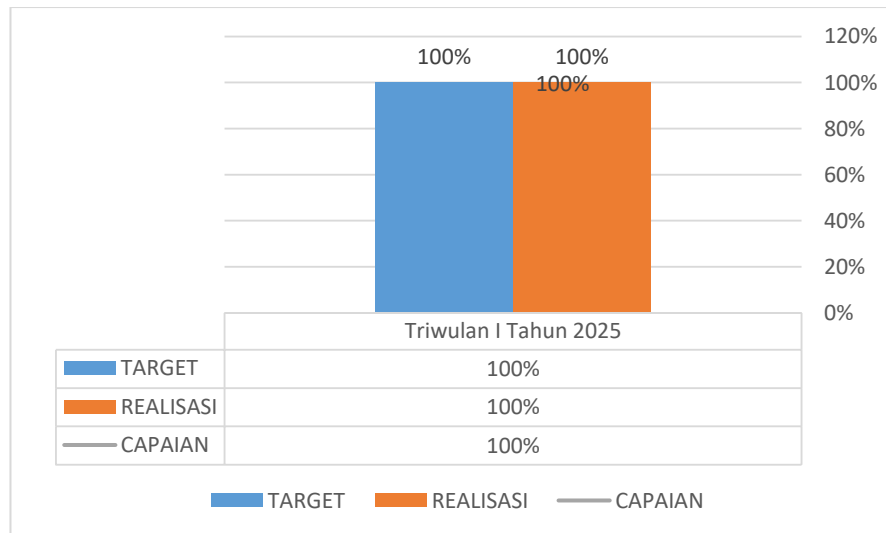
1) Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (Tempered)

- Ruas 08, SNOPI - KEBAR – PRAFI
- Ruas 013, RANSIKI - MAMEH

Adapun total Pagu anggaran untuk Kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (prioritas nasional) yaitu sebesar Rp. 2.149.475.000 dengan realisasi anggaran hingga Triwulan I sebesar Rp 1.773.316.875 atau sebesar 83% dari total nilai kontrak.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebanyak 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% pencapaian ini digambarkan pada Gambar II. 7 Grafik capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.



Gambar II. 5 Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal berdasarkan Perjiden SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

- Kronologi Target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi lapangan yang mendukung, seperti cuaca
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu
3. Kesesuaian dengan kebutuhan

- Potensi Kegagalan

Meskipun capaian kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal memenuhi target, namun terdapat potensi kegagalan dalam memenuhi target capaian kinerja, yakni :

1. Perlengkapan jalan yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan, jumlahnya banyak sedangkan anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan perlengkapan jalan, terbatas;
2. Suplai bahan material dan logistik terlambat;
3. Keterlambatan penyiapan dokumen pendukung dari pemerintah daerah untuk realisasi kegiatan bantuan teknis perlengkapan jalan.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja yakni sebagai berikut :

Realisasi Kinerja

$$= \frac{\text{Presentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal}}{\text{Target Presentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal}}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

Dari perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui untuk realisasi kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 100%.

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja yakni sebagai berikut:

% Capaian kinerja

$$= \frac{\text{realisasi pengadaan dan pemasangan Faskes}}{\text{Target pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal yakni 100%.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan pencapaian kinerja lebih optimal
2. Melakukan pengawasan yang baik terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan.
3. Mempersiapkan rencana kebutuhan kegiatan pengadaan dan pemasangan faskes ditahun yang akan datang.

2. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

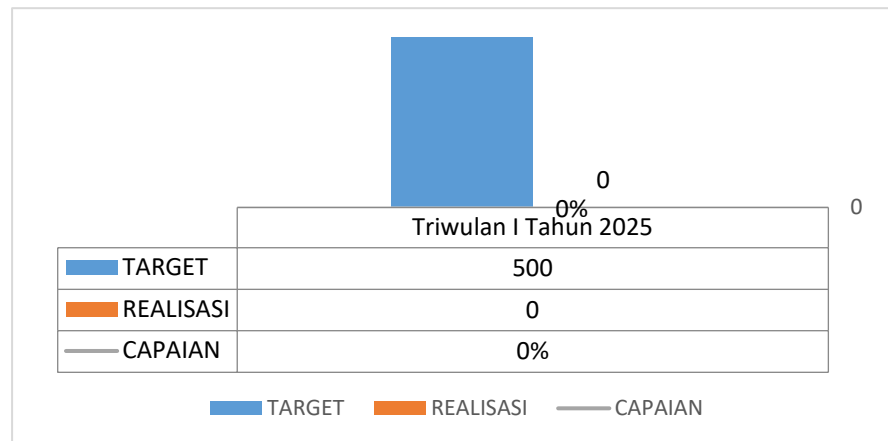
Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebanyak 0 orang jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 500 orang maka capaian kinerja masih 0% pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.8 Grafik capaian IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat.

Realisasi kinerja kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat masih 0 karena pada rencana aksi Tahun 2025 kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September 2025.



Gambar II. 6 Grafik perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Narasi Dasar Hukum

Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b "Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan memiliki target 500 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Tingginya pengguna Jasa Angkutan Umum;
2. Petugas dipelabuhan penyeberangan menyampaikan informasi keselamatan di lingkungan pelabuhan penyeberangan sebelum kapal berangkat;
3. Petugas Menyampaikan informasi dengan Jelas dan singkat.

Potensi Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Tidak tersampainya informasi keselamatan karena penumpang tidak memperhatikan
2. Kemungkinan Petugas tidak ada di tempat saat Bus akan berangkat
3. Petugas yang menyampaikan informasi kurang kompeten.

Perhitungan Realisasi Kinerja

Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi akan dilaksanakan pada bulan September 2025

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat Tahun 2025 Triwulan I terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja

= Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ

$$Realisasi\ Kinerja = 0$$

Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat adalah 0 orang

$$Capaian\ Kinerja = \frac{\text{Jumlah masyarakat Tersosialisasi}}{\text{Target Masyarakat Tersosialisasi}}$$

$$Capaian\ Kinerja = \frac{0}{500} \times 100 = 0\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja untuk Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat yakni 0%.

Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan total Pagu yaitu Rp. 300.000.000 namun pelaksanaan kegiatan masih menunggu hasil efisiensi anggaran apakah kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat akan melakukan pengusulan untuk kegiatan sosialisasi tentang keselamatan Transportasi Darat yang lebih besar dengan sasaran masyarakat yang lebih luas.
2. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memberikan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Mengoptimalkan sosial media sebagai sarana promosi kegiatan dan sarana penyebaran informasi terkait keselamatan transportasi darat.

3. IKK 3.6 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

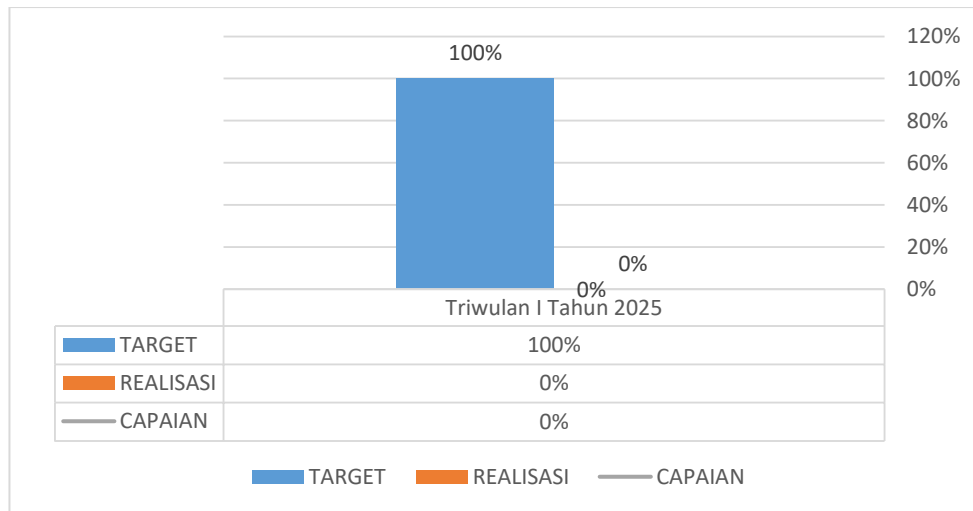
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 0%, jika di bandingkan dengan target revisi I perjanjian kinerja yaitu 100% maka capaian kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yakni 0%.



Gambar II. 7 Grafik perbandingan Realisasi Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan, Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain:

1. Adanya permintaan dari Dishub Kab/ Kota untuk dilaksanakannya standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.
2. Kelengkapan Alat uji yang akan di kalibrasi.
3. Peralatan yang akan di uji sudah terstandar.

Potensi Kegagalan

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, untuk capaian kinerja standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yakni 0%. Meskipun sudah memenuhi target, namun terdapat potensi kegagalan pada indikator kinerja standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yakni :

4. Infrastruktur pengujian berkala kendaraan bermotor belum memadai dan belum dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;
5. Belum adanya SDM kompeten untuk menangani pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. Fasilitas penunjang pengujian berkala kendaraan bermotor yang belum lengkap.

Realisasi Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja

$$= \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (Kota + Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{0}{2} \times 100\% = 0\%$$

Jumlah UPUBKB milik pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Papua sebanyak 2 (dua) Pemda, dengan rincian Pemda sebagai berikut :

- 1) Kota Sorong;
- 2) Kabupaten Sorong.

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui untuk realisasi kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yakni sebesar 0%.

Capaian Kinerja

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi Persentase standar pengujian berkala kendaraan bermotor}}{\text{Target Persentase standar pengujian berkala kendaraan bermotor}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{100} \times 100\% = 0\%$$

Pagu, realisasi, dan capaian keuangan

Adapun anggaran terkait persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu senilai Rp. 400.000.000 dan belum ada realisasi anggaran hingga Triwulan I.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
1. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat berencana melakukan pinjam pakai mobil uji keliling kepada pengujian yang sudah terakreditasi agar bisa menghasilkan BLUe dan mendorong pengujian untuk mengadakan system BLUe;
 2. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan kalibrasi dan akreditasi agar beberapa kabupaten yang belum memiliki alat uji terdorong untuk melakukan pengadaan alat uji;
 3. Meningkatkan kompetensi SDM petugas yang akan melaksanakan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.

II. 3. 4 Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

1. IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat
 - a.1. Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

 - a) Aspek Perencanaan;
 - b) Aspek Kepegawaian (SDM);
 - c) Aspek Keuangan;
 - d) Aspek Hukum dan Kerjasama.

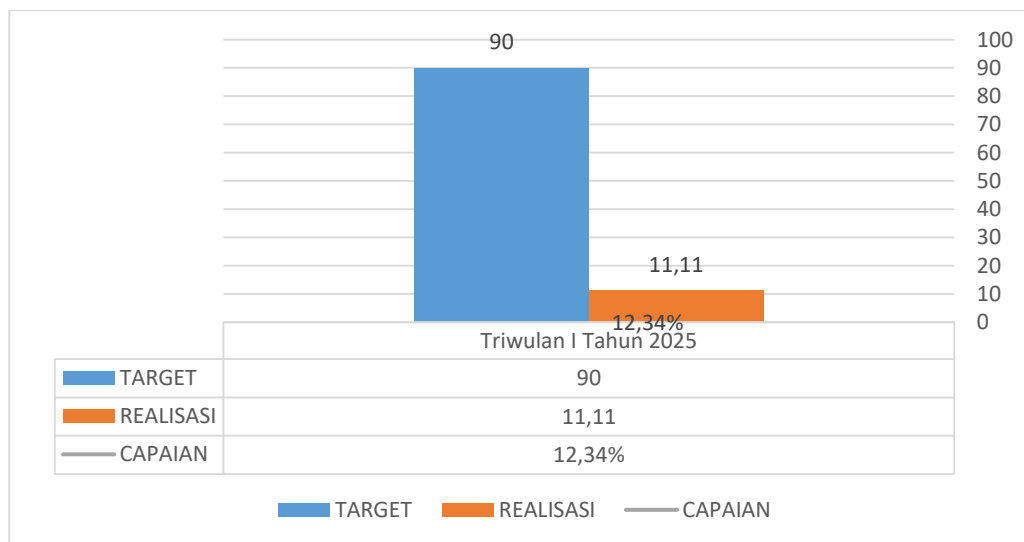
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada Triwulan I sebanyak 11,11% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 12,34% pencapaian ini digambarkan pada Gambar II. 10 Grafik capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.



Gambar II. 8 Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasidarat.

Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis transportasi darat memiliki target senilai 90 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kualitas penyelenggaraan dukunganteknis transportasi darat antara lain:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan
2. Terkordinasikannya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan stakeholderterkait
3. SDM yang bersolidaritas

Potensi Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknistransportasi darat antara lain:

1. Adanya pengurangan anggaran
2. Kurangnya SDM yang ada
- 3.Realisasi anggaran yang terlambat.

Realisasi Kinerja

Perhitungan IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat yakni sebagai berikut :

Tabel II. 3Perhitungan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25	25
	1	SAKIP	15	15
	a	Rencana Strategis (Renstra)	3	3
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai $\leq$ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
	c	Perjanjian Kinerja (PK)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen		

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 januari)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
e	Input Aplikasi e-Performance	1	1
	Nilai 1 (satu) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3	3
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤30 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 30-60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai >60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
2	Input Aplikasie-Planning	10	10
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan		
b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif		
c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif		
B	Indeks Profesionalisme ASN	25	25
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6	6
2	Kompetensi	10	10
3	Kinerja	8	8
4	Disiplin	1	1
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	25	25
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	10
	Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
	Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	10
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	5	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
D	Tingkat Pengelolaan Hukum dan Humas		25%	25%
	1	Penyusunan NSPK	7	7
		Nilai 7 (tujuh) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 5 (lima) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 3 (tiga) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 1 (satu) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas kurang dari 40%		
	2	Pengelolaan Informasi Publik	6	6
		Nilai 6 (enam) apabila sebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabila sebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabila kurang dari 70%		
	3	Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	6	6
		Nilai 6 (enam) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan kurang dari 70%		
	4	Pelaksanaan Advokasi Hukum	6	6
		Nilai 6 (enam) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 70,1% sampai dengan 90%		

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 2 (dua) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan kurang dari 70%		

Dalam pelaksanaan Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat}}{\text{Target Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{11,11}{90} \times 100 = 12,34 \%$$

Dari hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja sebesar 12,34%

Pagu, realisasi dan capaian keuangan

Adapun anggaran terkait Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat yaitu senilai Rp. 3.914.645.000 dengan realisasi anggaran hingga akhir triwulan I sebesar Rp 368.081.000 atau sebesar 9,40 % dari total Pagu.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan pencapaian kinerja lebih optimal;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan mengikuti berbagai pelatihan atau diklat yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan atau pihak lain yang berkompeten;
3. Optimalisasi realisasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan.

II. 3. 5 Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

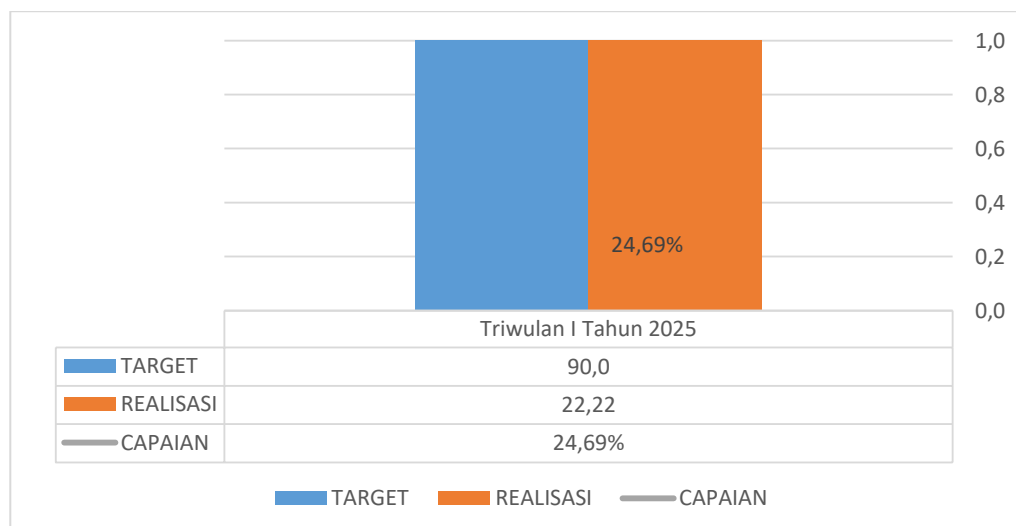
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan I sebanyak 22,22% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 24,68 % pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.11 Grafik capaian IKK Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



Gambar II. 9 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada tahun 2025.

Kronologi target pada perjanjian kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel memiliki target 90 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya SDM yang berkompeten
2. Kegiatan yang ada di Kantor sudah terjadwal secara rutin
3. Evaluasi setiap bulan

Potensi kegagalan

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yakni 50%. Meskipun begitu, terdapat potensi kegagalan dalam mencapai target capaian kinerja, yakni :

1. Kendala koneksi internet;
2. PC/Laptop mengalami kerusakan;
3. Fasilitas meja dan kursi mengalami kerusakan;
4. Tingkat kepuasan pimpinan terhadap hasil kerja staf berkurang.

Realisasi Kinerja

Dalam pelaksanaan Kegiatan Tingkat penyelenggaran perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaran perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Tabel II. 4 Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

NO	URAIAN		BOBOT
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15

Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja yakni sebagai berikut :

.....
Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat}}{\text{Target Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat}} \times 100\%$$

.....

$$\% \text{ Capaian} = \frac{22,22}{90} \times 100 = 24,68 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja dapat diketahui bahwa capaian kinerja yakni 24,68%.

Narasi pagu, realisasi, dan capaian keuangan

Adapun anggaran terkait Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat yaitu senilai Rp8.345.931.000 dengan realisasi anggaran hingga akhir Triwulan I sebesar Rp 2.033.087.035 atau sebesar 24,36 % dari total Pagu.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan pencapaian kinerja lebih optimal;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat;
3. Menyediakan Fasilitas Perkantoran yang memadai.

II.3. Alokasi Anggaran Tahun 2025

III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar Rp.92.243.346.000,- dengan rincian per Sumber Dana sebagai berikut:

Tabel II. 5 Rincian Pagu Awal per Sumber Dana

RM	Rp.	74.600.506.000	80,87%
PNBP	Rp.	17.642.840.000	19,13%
SBSN	Rp.	-	0%
Total	Rp.	92.243.346.000	100,00%

Tabel III.16 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	-	-
Belanja Barang	Rp.	79.720.664.000	86,42%
Belanja Modal	Rp.	12.522.682.000	13,58%
Total	Rp.	92.243.346.000	100,00%

Hingga saat ini belum ada perubahan nilai Pagu pada DIPA BPTD Kelas II Papua Barat namun sekita 50% anggaran masih diblokir karena kebijakan efisiensi anggaran.

Tabel II. 6 Rincian Pagu per Sumber Dana Triwulan I

RM	Rp.	74.600.506.000	80,87%
PNBP	Rp.	17.642.840.000	19,13%
SBSN	Rp.	-	0%
Total	Rp.	92.243.346.000	100,00%

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Pagu DIPA TA. 2025 sebesar **Rp. 92.243.346.000,-** dengan rincian per Jenis Belanja sebagai berikut:

Tabel II. 7 Rincian Pagu per Jenis Belanja

Belanja Pegawai	Rp.	-	-
Belanja Barang	Rp.	79.720.664.000	86,42%
Belanja Modal	Rp.	12.522.682.000	13,58%
Total	Rp.	92.243.346.000	100,00%

c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Pengurangan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai surat pengesahan Revisi Anggaran sebagai Berikut :

- 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 02 Desember 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (DIPA Awal);
- 2) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 15 Januari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-1);
- 3) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 22 Januari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-2);
- 4) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 8 Februari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-3);
- 5) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 22 Februari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-4);
- 6) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 24 Maret 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-5).

2. Refocusing Anggaran Tahun 2025

a. Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025

Sampai pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat mengalami beberapa kali revisi POK namun belum ada perubahan pada nilai Pagu. Berikut adalah rincian revisi anggaran per sumber dana.

Tabel II. 7 Rincian Revisi Anggaran Tahun 2025 per Sumber Dana

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-1	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-2	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-3	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-4	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-5	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000

b. Rincian Realokasi Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun rincian realokasi anggaran per jenis belanja dijelaskan pada tabel di bawah ini. Sampai dengan Triwulan I belum terdapat perubahan nominal per sumber dana dan per jenis belanja TA 2025.

Tabel II. 8 Rincian Revisi Anggaran Tahun 2025 Per Jenis Belanja

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-1	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-2	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-3	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-4	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-5	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000

c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja TA 2025

Adapun rincian realokasi anggaran per sumber dan per jenis belanja pada Triwulan I Tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

ALOKASI	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	79.720.664.000	-	79.720.664.000
• RM	62.077.824.000	-	62.077.824.000
• PNBP	17.642.840.000	-	17.642.840.000
Belanja Modal	12.522.682.000		12.522.682.000
• RM	12.522.682.000	-	12.522.682.000
• PNBP	-	-	-
• SBSN	-	-	-
TOTAL	92.243.346.000	-	92.243.346.000

d. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan TA 2025

Adapun rincian realokasi anggaran per sumber dan dan per jenis belanja dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 9 Rincian Realokasi per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan T.A 2025

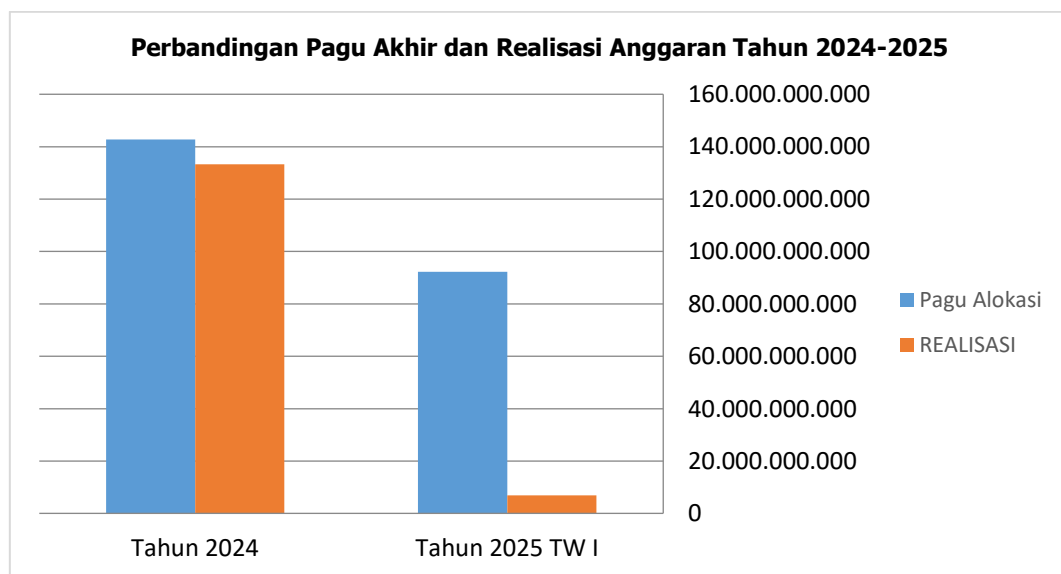
KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	81.381.240.000	81.381.240.000	4.242.427.524	5,21%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	60.113.993.000	60.113.993.000	2.073.883.649	3,45%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	17.352.602.000	17.352.602.000	1.800.162.875	10,37%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	3.914.645.000	3.914.645.000	368.081.000	9,40%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2024-2025

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari Tahun 2024 – 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 10 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 – Tahun 2025

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2024	154.542.192.000	142.807.241.000	133.249.015.645	93,31
2	2025 TW I	92.243.346.000	92.243.346.000	6.878.382.559	7,46



Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga di ketahui masing-masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun **2024** anggaran yang terserap sebesar Rp. 133.249.015.645,- atau mencapai 93,31% dari pagu akhir sebesar Rp. 142.807.241.000,-. Pada Tahun **2025** anggaran yang terserap hingga TW I sebesar Rp. 6.878.382.559,- atau mencapai 7,46 % dari pagu akhir sebesar Rp. 92.243.346.000,-.

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per sasaran kegiatan dan kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 11 Realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	81.381.240.000	81.381.240.000	4.242.427.524	5,21%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	60.113.993.000	60.113.993.000	2.073.883.649	3,45%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	17.352.602.000	17.352.602.000	1.800.162.875	10,37%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	3.914.645.000	3.914.645.000	368.081.000	9,40%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%

2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 12 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	79.720.664.000	6.851.536.559	8,59
3	Belanja Modal	12.522.682.000	26.846.000	0,21
Total		92.243.346.000	6.878.382.559	7,46

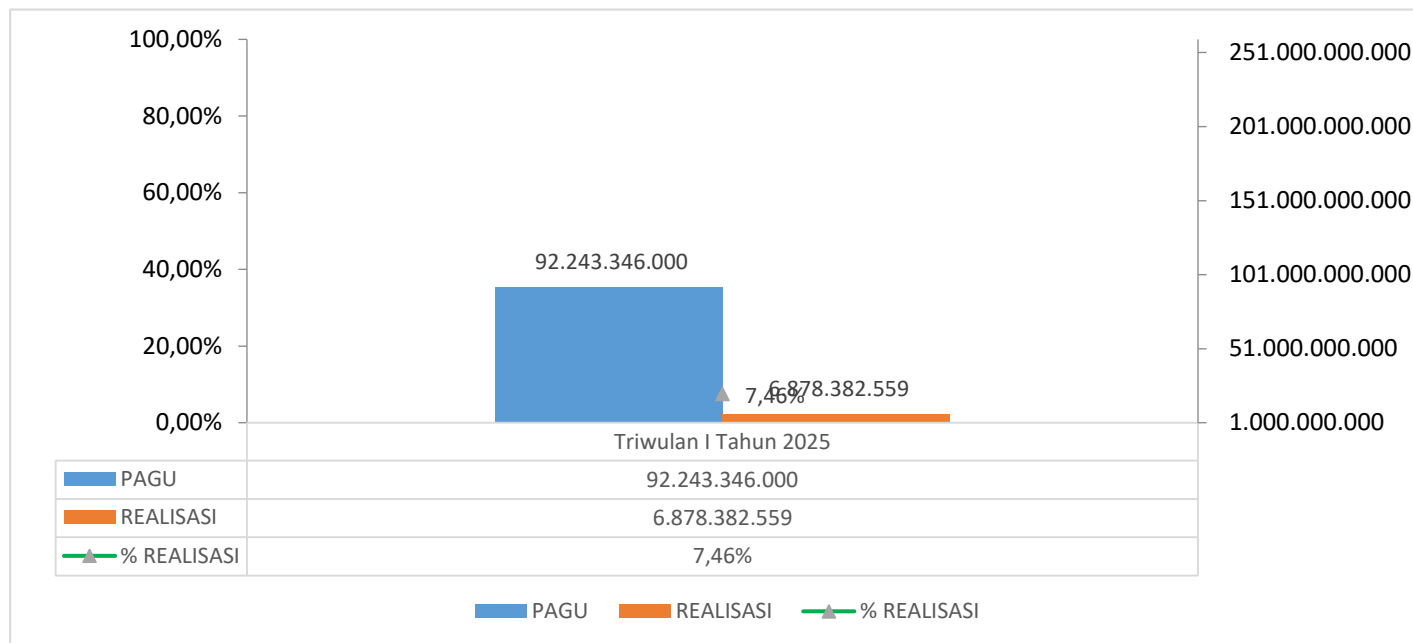
Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja pada Triwulan I Tahun 2025 untuk belanja barang sebesar Rp. 6.851.536.559 atau sebesar 8,59% dari total pagu Rp. 79.720.664.000 dan untuk belanja modal realisasi sebesar Rp. 26.846.000 atau sebesar 0,21% dari total pagu Rp. 12.522.682.000.

3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun Anggaran 2025 yang sudah di analisis per Triwulan I untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 13 Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI TW I	REALISASI TW I	
			Rp	%
1	Rupiah Murni	74.600.506.000	6.878.382.559	9,22
2	PNBP	17.642.840.000	-	-
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		92.243.346.000	6.878.382.559	7,46



4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 14 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	79.720.664.000	6.851.536.559	72.869.127.441
3	Belanja Modal	12.522.682.000	26.846.000	12.495.836.000
TOTAL		92.243.346.000	6.878.382.559	85.364.963.441

Tabel II. 15 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	74.600.506.000	6.878.382.559	67.722.123.441
2	PNBP	17.642.840.000	-	17.642.840.000
3	SBSN			
TOTAL		92.243.346.000	6.878.382.559	85.364.963.441

Tabel II. 16 Rincian Kegiatan Terblokir Tahun 2025

NO	KEGIATAN	SISA PAGU
1	Program Infrastruktur Konektivitas	45.573.494.400
2	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	33.663.836.080
3	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	9.717.457.120
4	Penunjang Teknis Transportasi Darat	2.192.201.200
5	Program Dukungan Manajemen	6.082.779.360
6	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.082.779.360
TOTAL		51.656.273.760

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 16 Rincian Efisiensi Anggaran

No	SASARAN PROGRAM	TRIWULAN I		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	52,5%	18,7%	33,8%
2	SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	0%	23,97%	-23,97%
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	3,33%	27,23%	-23,9%
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	12,34%	9,40%	2,94%
5	SK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	24,68%	24,36%	0,32%
Rata-rata		18,57%	20,73%	0%

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat, membutuhkan SDM yang mencukupi sehingga dapat menunjang optimalisasi pelayanan transportasi darat di kantor induk maupun di kantor satuan pelayanan.

Tabel II. 17 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Jumlah kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	315	154	50,15%	30,796	33,67%	146,63%

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 30,796, dengan realisasi kinerja sebesar 33,67% menunjukkan capaian SDM sebesar 50,15% dengan realisasi sebanyak 158 dari jumlah kebutuhan SDM sebesar 315, Dimana realisasi tersebut terdiri dari 73 orang PNS, 1 Orang PPPK dan 80 PPNPN.

II.3.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih dalam realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Anggaran untuk beberapa kegiatan masih di blokir sehingga kegiatan belum bias dilaksanakan;
2. Kegiatan kontraktual seperti Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.
3. Masih kurangnya pemenuhan dalam Sumber Daya Manusia yang mana tugas dan fungsinya di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
4. System perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran sehingga masih banyak melakukan revisi anggaran.
5. Dalam kegiatan pembangunan, faktor cuaca/faktor alam yang tidak menentu menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaannya.



BAB III

PENUTUP

BAB III

PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dapat disampaikan bahwa dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang lebih besar atau sama dengan 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$) dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang kurang dari 100% ($0\% \leq IK < 100\%$). Adapun rincian untuk setiap IKK pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 32,07% (target 100%) tercapai 32,07%;
2. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 125,43% (target 100) tercapai 25,43%;
3. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 8 lokasi (target 8 lokasi) tercapai 100%;
4. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi sebesar 0% (target 100) tercapai 0%;
5. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 100% (target 100) tercapai 100%;
6. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0 orang (target 500) tercapai 0%;
7. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 0% (target 100) tercapai 0%;
8. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 11,11 (target 90) tercapai 12,34%;
9. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 22,22 (target 90) tercapai 24,68%.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Berdasarkan hasil evaluasi diperlukan rekomendasi dalam upaya perbaikan disertai unit kerja yang bertanggung jawab dalam melakukan rekomendasi yang disusun. Berikut hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab :

Tabel III. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	RALISASI	CAPAIAN (%)			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	32,07	32,07%	TIDAK TERCAPAI	1. Meningkatkan Koordiansi dengan pihak GM Damri cabang agar target tahun-tahun berikutnya dapat tercapai dengan baik. 2. Mengoptimalkan revisi anggaran terkait angkutan perintis jalan agar alokasi anggaran setiap cabang Damri sesuai dengan kebutuhan	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	25,43	25,43%	TIDAK TERCAPAI	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak ASDP dan pihak lainnya agar kegiatan dapat berjalan dengan baik; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia mengingat saat ini anggaran mengalami efisiensi.	3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	7	7	100%	TERCAPI	1. Menambah dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil 2. Mengoptimalkan pelayanan dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia. 3. terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait baik di instansi pusat maupun di tingkat daerah	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	0	0%	TIDAK TERCAPI	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan pencapaian kinerja lebih optimal 2. berupaya meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	Seksi ASDP
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100%	TERCAPI	1. beberapa kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan belum bisa dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran 2. melakukan pengawasan terhadap faskes yang sudah di pasang selama masa pemeliharaan.	Seksi LLAJ
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi	Orang	500	500	0	0 %	TIDAK TERCAPI	1. melakukan persiapan kegiatan sosialisasi	Seksi Sarpras

				tentang keselamatan transportasi darat							keselamatan jalan yang bias dilakukan dengan tiding menggunakan banyak anggaran mengingat saat ini anggaran kegiatan masih diblokir.	
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100	0	0 %	TIDAK TERCAPAI	1. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat berencana melakukan pinjam pakai mobil uji keliling kepada pengujian yang sudah terakreditasi agar bisa menghasilkan BLUe dan mendorong pengujian untuk mengadakan system BLUe. 2. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan kalibrasi dan akreditasi agar beberapa kabupaten yang belum memiliki alat uji terdorong untuk melakukan pengadaan alat uji.	Seksi Sarpras
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	11,11	12,34%	TIDAK TERCAPAI	1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan; 2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi	Seksi Tata Usaha

											keselamatan Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang (Rampcheck) secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana transportasi. 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan pencapaian kinerja lebih optimal.	
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	22,22	24,68 %	TIDAK TERCAPAI	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan pencapaian kinerja lebih optimal 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.	Seksi Tata Usaha



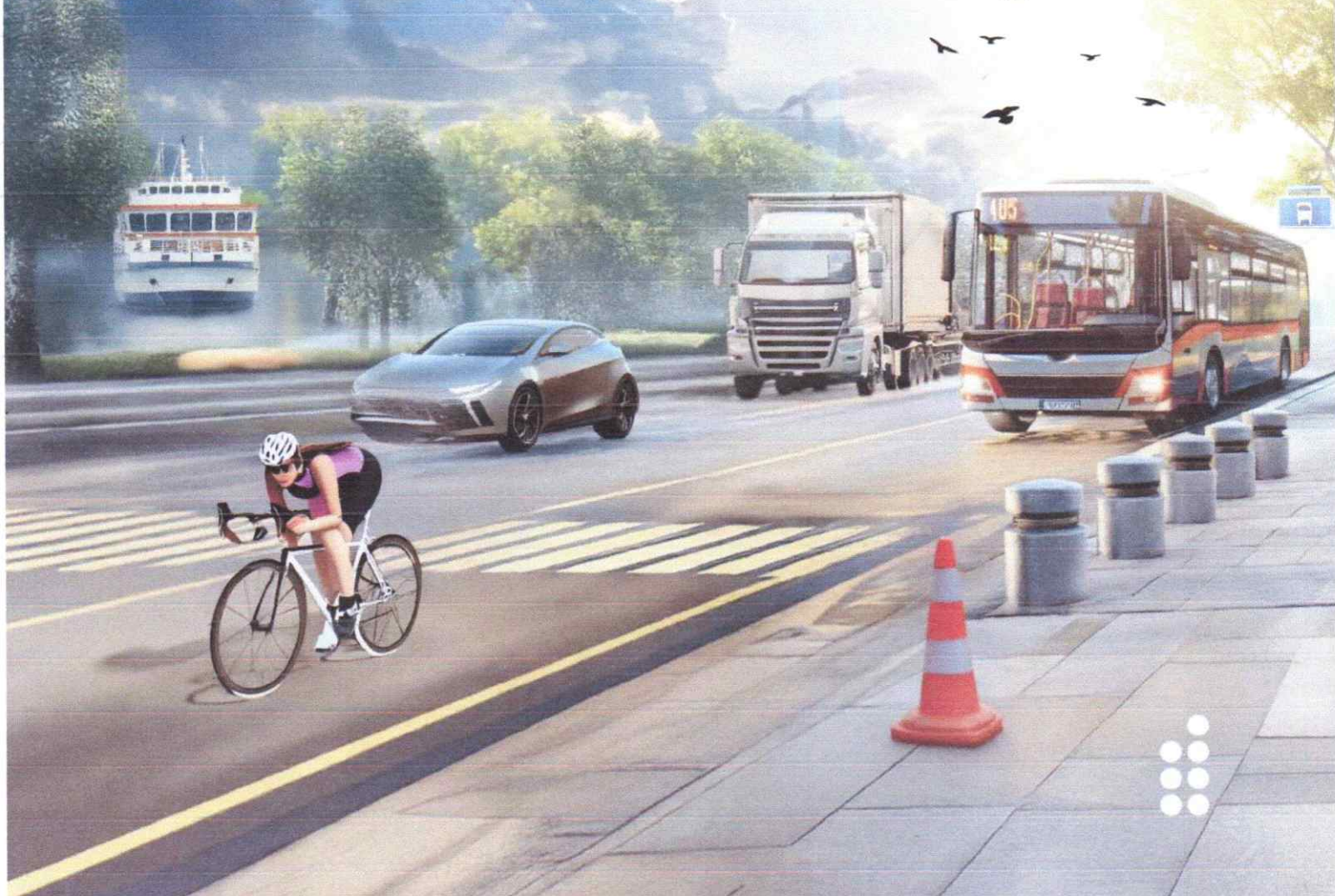
LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN

20 25

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Sorong, 14 Desember 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002



Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Papua Barat**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Masnah, S.Pd.I.	Pengelola Keuangan	8-1-2025	yh.
2.	Diperiksa	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8-1-2025	g
3.	Disetujui	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8-1-2025	g
4.	Disetujui	Andreas, S.E, M.E.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	8-1-2025	/
5.	Disetujui	Herwanto, A.Md.LLAJ., S.IP., M.M.	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	8-1-2025	/
6.	Disetujui	Syaifullah, S.T.	Plt. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	8-1-2025	/



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edy Purwanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Ahmad Yani, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Sorong, 15 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat

Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	60.113.993.000
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	17.352.602.000
3. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	3.914.645.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	10.862.106.000

Sorong, 15 Januari 2025

Disetujui

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Ahmad Yani, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	8,3	16,6	25,5	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,4	91,7	100	7.742.992.000	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Subsidi Operasional Perintis angkutan penyeberangan Provinsi Papua Barat	8,3	16,6	25,5	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,4	91,7	100	35.371.001.000	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2.516.175.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pelaksanaan pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	-	-	-	-	-	40	70	100	-	-	-	100	2.516.175.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	-	30	40	50	60	80	100	-	-	-	-	-	12.456.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
					2. Bantuan Teknis Perlengkapan jalan	-	30	40	50	60	80	100	-	-	-	-	-	921.292.000	
					3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	-	30	40	50	60	80	100	-	-	-	-	-	1.100.000.000	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					4. Pemeliharaan Perengkapan Jalan	-	30	40	50	60	80	100	-	-	-	-	-	2.068.167.000	
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat	Orang	500	Penyelenggaraan pekan keselamatan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	300.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
					Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	107.143.000	
					Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000.000	
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100		-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	3.914.645.000	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 3. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 4. Sub Bagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	8.345.931.000	Sub Bagian Tata Usaha

Sorong, 15 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto

NIP. 19841217 200912 1 002

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

BULAN JANUARI TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	7.742.992.000	100	-	0	0,00	0,00	kegiatan sudah berjalan dengan menggunakan kontrak PL (Penunjukan Langsung) namun belum ada realisasi anggaran	rencana pembayaran termin I akan dilakukan pada minggu kedua bulan Februari setelah efisiensi anggaran di pusat telah selesai	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	1 Subsidi Operasional Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	35.371.001.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan sudah berjalan dengan menggunakan kontrak PL (Penunjukan Langsung) namun belum ada realisasi anggaran	rencana pembayaran termin I akan dilakukan pada minggu kedua bulan Februari setelah efisiensi anggaran di pusat telah selesai	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	1. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	0	0	0,00	0,00	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	1. Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapal	jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksanakan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0	-	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						2. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	2.068.167.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	

		IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
					4. Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	4	100	12.456.000.000	100	0	0	0,00	0,00	telah dilakukan kontrak pada pengadaan paku jalan	rencana pembayaran uang muka akan dilakukan pada bulan Februari	
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	1. Sosialisasi Keselamatan Berjalan Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dll	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	1. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	3.914.645.000	100	5,00	115.824.000	5,56	2,96	beberapa kegiatan rutin telah dilaksanakan seperti perjalanan dinas dan belanja keperluan kantor	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 4. Subbagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	6,00	550.680.000	6,67	6,60	telah dilakukan belanja sewa untuk mes eselon 3 dan 4 serta sewa mes untuk pegawai	sisa belanja sewa akan dilaksanakan pada bulan Februari	Subbagian Tata Usaha

Sorong, 4 Februari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT

BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	7.195.322.104	100	-	411.198.563	0,00	5,71	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin I	rencana selanjutnya akan di lakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	1 Subsidi Operasional Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	16.609.782.000	100	0	1.236.500.104	0,00	7,44	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin I	rencana selanjutnya akan di lakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	1. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	100	361.644.000	100,00	14,37	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik khususnya pada periode angkutan lebaran Tahun 2025	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	1. Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapal	jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	10,00	361.644.000	10,00	14,37	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksanakan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0	-	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						2. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	2.068.167.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	

		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						4. Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	4	100	12.456.000.000	100	0	0	0,00	0,00	telah dilakukan kontrak pada pengadaan paku jalan	rencana pembayaran uang muka akan dilakukan pada bulan Maret 2025	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	1. Sosialisasi Keselamatan Berjalan Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dll	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	1. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUKKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	3.914.645.000	100	10,00	360.681.000	11,11	9,21	beberapa kegiatan rutin telah dilaksanakan seperti perjalanan dinas dan belanja keperluan kantor	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 4. Subbagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	10,00	930.554.672	11,11	11,15	telah dilakukan belanja sewa untuk mes eselon 3 dab 4 serta sewa mes untuk pegawai	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	Subbagian Tata Usaha

Sorong, 4 Maret 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

BULAN MARET TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	3.786.268.590	100	17,00	837.383.545	17,00	22,12	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin II dan Telah dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	1 Subsidi Operasional Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	12.346.883.000	100	17	1.236.500.104	17,00	10,01	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin I dan telah di lakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	memproses pembayarn termin I untuk I lintasan yang belum ada realisasi anggaran dan melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	1. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	100	603.168.000	100,00	23,97	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik khususnya pada periode arus balik angkutan lebaran Tahun 2025	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	1. Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapal	jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	20,00	603.168.000	20,00	23,97	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksanakan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0	-	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						2. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	2.068.167.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	

		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						4. Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan	4	100	2.203.167.000	100	50	1.800.162.875	50,00	81,71	pekerjaan masih dan sedang berjalan saat ini sudah pembayaran uang muka	rencana pembayaran selanjutnya setelah progres pekerjaan sudah manngkat	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	1. Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dll	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	1. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUKKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	3.914.645.000	100	10,00	368.081.000	11,11	9,40	beberapa kegiatan rutin telah dilaksanakan seperti perjalanan dinas dan belanja keperluan kantor	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 4. Subbagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	20,00	2.033.087.035	22,22	24,36	telah dilakukan belanja sewa untuk mes eselon 3 dab 4 serta sewa mes untuk pegawai. Pembayaran gaji untuk PPNPN dan jasa Outsorsing hingga bulan maret maret telah di bawarkan	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	Subbagian Tata Usaha

Sorong, 4 April 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**